

## KOMISI IX DPR RI DAPAT LAPORAN DUGAAN PRAKTIK PERJOKIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA



Sumber: Today.line.me

Mataram (Suara NTB) – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan spesifik terkait monitoring dan evaluasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja di NTB. Komisi yang membidangi masalah ketenagakerjaan ini mendapatkan informasi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) NTB, bahwa ada praktik perjokian dalam program kartu prakerja.

“Ini yang kita monitoring dan evaluasi di sini. Masukan cukup banyak, sampai ada ada joki-joki, tadi (informasi) dari SPSI. Nanti akan kita evaluasi lagi,” kata Ketua Rombongan Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena dikonfirmasi usai pertemuan di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Kamis, 18 Maret 2021.

Emanuel mengatakan tujuan program kartu prakerja adalah meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Ia menyebutkan, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program kartu prakerja tahun 2020.

Pihaknya berharap, uang negara yang begitu besar jangan sampai dinikmati oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan adanya dugaan praktik perjokian program kartu prakerja. Jika ini yang terjadi, maka akan muncul ketidakadilan.

“Ini yang kita mau awasi betul. Jangan sampai data kurang bagus. Sehingga uang itu terbuang begitu saja untuk kartu prakerja ini,” ucapnya.

Ia mengatakan, program kartu prakerja jangan hanya bisa diakses lewat online tetapi juga offline. Bahkan, katanya, banyak juga yang sudah mengakses secara online, tidak diterima dalam program kartu prakerja. Sehingga, ini akan memunculkan ketidakadilan.

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga melakukan monev terkait pelaksanaan program BSU tahun 2020 di NTB. Ia menyebut, anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk program BSU mencapai Rp30 triliun.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtunewe mengatakan praktik perjokian dalam kartu prakerja bisa terjadi karena tidak semua orang memiliki telepon pintar (handphone) untuk mendaftar program kartu prakerja. Dengan adanya perjokian, maka uang yang seharusnya diterima masyarakat yang diterima dalam program kartu prakerja terpotong, karena adanya perjokian.

“Orang yang tidak punya handphone pintar, tidak punya akses. Bahkan itu sebabnya mereka sampai gunakan joki. Ini kan ndak benar. Berarti di situ ada harga (membayar joki). Ini ndak boleh seperti itu,” tegasnya.

Untuk itu, pendaftaran kartu prakerja bukan saja lewat online tetapi juga manual atau offline. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja perlu mewadahnya kemudian melibatkan asosiasi tenaga kerja di daerah.

“Karena banyak tak punya handphone pintar. Jangankan untuk beli handphone, untuk makan saja sudah sulit,” kata Felly.

Felly juga menekankan pentingnya sinkronisasi data. Karena yang didata oleh Pemda hanya mereka yang mendaftar secara manual, sedangkan online tidak dilaporkan ke Pemda.

Sementara, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., mengatakan kunjungan Komisi IX DPR RI dalam rangka monev program BSU dan kartu prakerja sangat baik. Sehingga bisa dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan terkait program tersebut.

“Termasuk data-data yang terecord di kita sifatnya offline. Sementara data yang online, di pusat tempatnya. Sehingga kita akan padukan data yang offline dan online,” katanya.

Dengan adanya sinkronisasi data, akan bisa diketahui jumlah kuota yang diberikan untuk NTB. Apakah kuotanya terpenuhi atau masih kurang dari jatah yang diberikan Pemerintah Pusat.

“Kalau masih kurang (belum terpenuhi), sayang sekali. Sementara dampak Covid-19 cukup serius. Banyak yang membutuhkan bantuan melalui program kartu prakerja. Kita ingin kuota yang ada terpenuhi. Bahkan bisa kita mohon lagi tambahan,” katanya.

Untuk itu, ia meminta Kepala Disnakertrans NTB terus berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemenko Perekonomian. Sehingga data penerima BSU dan kartu prakerja terkonsolidasi dengan baik.

“Karena kita berkepentingan dengan data yang baik. Jangan sampai ada modus operandi, kartu prakerja dimanfaatkan oleh orang-orang karena menggunakan sistem online dengan menggunakan joki atau modus yang lain. Sehingga kartu prakerja jatuh ke orang tak bertanggungjawab,” ujarnya.

Sementara, masih banyak masyarakat yang berhak menerima dan sangat membutuhkan program tersebut namun tidak bisa terakomodir. Dengan terkonsolidasinya data penerima kartu prakerja diharapkan praktik perijokian dapat diminimalisir.

“Kita tidak ingin datanya tidak terkonsolidasi dengan baik. Antara yang offline dan online. Sehingga ada peluang orang untuk bermain angka itu. Ketika ada evaluasi akhir tahun program ini, kita babak belur,” tandasnya. (nas)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/komisi-ix-dpr-ri-dapat-laporan-dugaan-praktik-perijokian-program-kartu-prakerja/>, Diakses 19 Maret 2021
2. Suara NTB, Komisi IX DPR RI Dapat Laporan Dugaan Praktik Perijokian Program Kartu Prakerja, Diakses 19 Maret 2021
3. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/19/03/2021/pendaftaran-online-kartu-prakerja-diduga-rentan-perijokian/>, Diakses 19 Maret 2021
4. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32184/t/javascript>, Diakses 19 Maret 2021

#### **Catatan:**

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja:

- Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi

- Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja
- Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri
- Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
- Program Kartu Prakerja bertujuan:
  - a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan
  - b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja
- Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja. Kartu Prakerja diberikan kepada Pencari Kerja. Selain kepada Pencari Kerja, Kartu Prakerja dapat diberikan kepada Pekerja/Buruh yang terkena PHK atau Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja. Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh harus memenuhi persyaratan WNI, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
- Kartu Prakerja digunakan untuk mendapatkan manfaat pelatihan dan insentif.
- Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan. Pelatihan tersebut meliputi pembekalan Kompetensi Kerja, peningkatan Kompetensi Kerja, atau alih Kompetensi Kerja. Pelatihan dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*